

KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROGRAM FOLU (*Forestry and Other Land Uses*)

Author:
Suprayitno

Affiliation:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Email:
suprayitno@fisip.upr.ac.id

*Corresponding Author

Suprayitno
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya
suprayitno@fisip.upr.ac.id

Received: Oktober 21, 2022
Revised: November 8, 2022
Accepted: November 30, 2022
Available Online: December 1, 2022

Abstrak

Perubahan Iklim merupakan salah satu isu yang menarik perhatian dari berbagai negara di dunia beberapa dekade ini. Dampak salah satu diantaranya adalah mulai tidak menentunya musim, kenaikan suhu yang fluktuatif serta perubahan cuaca yang cukup signifikan. Upaya Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim telah dibuktikan komitmennya berupa keterlibatannya dalam menandatangani Persetujuan Paris pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Sebagai tindak lanjutnya terkait komitmen tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah berbasis studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai salah satu provinsi yang memiliki hutan yang cukup luas berkomitmen untuk ikut terlibat dalam program Folu (*Forestry and Other Land Uses*) Net sink 2030.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Komitmen, Folu, Kalimantan Tengah.

Abstract

*Climate change is one of the issues that has attracted the attention of various countries in the world in recent decades. The impact of one of them is the start of erratic seasons, fluctuating temperature increases and significant weather changes. Indonesia's efforts to mitigate climate change have proven its commitment in the form of its involvement in signing the Paris Agreement on April 22, 2016 in New York, United States of America. As a follow-up to this commitment, the Government of the Republic of Indonesia issued Law Number 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. The research method used in this paper is based on literature study. The results of this study are that Central Kalimantan Province, as one of the provinces that has a large enough forest, is committed to being involved in the Folu (*Forestry and Other Land Uses*) Net sink 2030 program.*

Keywords: Climate Change; Commitment; Folu; Central Kalimantan.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan terjadi dimana – mana saat ini, yang kemudian berbagai negara menyoroti berbagai permasalahan di dunia yang tak lagi merasa aman dan nyaman tinggal di muka bumi. Berbagai isu –isu perubahan iklim kemudian menarik minat para penggiat lingkungan untuk mengkampanyekan betapa rusaknya bumi ini akibat tangan – tangan jahil baik dari individu ataupun lingkup luas corporate yang tidak bertanggung jawab. Tentu, ibarat sebuah penyakit yang menular seperti corona virus disease (covid-19), maka sejatinya perubahan iklimpun sama menghawatirkannya karena dampak negative yang ditimbulkan juga besar di seluruh dunia.

Keterlibatan Indonesia sebagai upaya pencegahan krisis lingkungan khususnya dalam program mitigasi perubahan iklim sangat dibutuhkan oleh dunia. Indonesia yang digadang – gadang memiliki wilayah hutan yang luas punya potensi besar bahwa Indonesia menjadi garda terdepan dalam penyelamatan kerusakan bumi akibat pengelolaan sumber daya di bumi yang tidak profesional terhadap keberlanjutan. Tentu keterlibatan Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim tidak hanya sebatas dituangkan dalam peraturan (dalam hal ini salah satu Peraturan yang ada yaitu Undang – undang nomor 16 Tahun 2016) Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Tentu bukan hanya Undang – Undang yang dilegalkan namun juga komitmen Indonesia bersama masyarakatnya agar undang – undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik agar kerusakan lingkungan, khususnya di Indonesia dapat dikendalikan. Dan komitmen dalam mitigasi perubahan iklim, sekali lagi bukan hanya milik Indonesia, tapi seluruh negara di Dunia.

Kalimantan Tengah, sebagai Provinsi terluas kedua di Indonesia dan memiliki kawasan hutan yang luas di Indonesia tentu tidak berdiam diri untuk terlibat dalam mensukseskan program mitigasi perubahan iklim. Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi bersama 11 provinsi lainnya di Indonesia yang dilibatkan dalam program FOLU Net Sink hingga 2030 nantinya. Peluang ini tentu harus mampu dimanfaatkan oleh Kalimantan Tengah, apalagi saat ini dengan adanya perpindahan ibukota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, maka Indonesia sebagai salah satu provinsi penyangga Ibukota baru tentu harus mampu menjadi provinsi yang mampu meminimalisir kerusakan – kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Kalimantan Tengah harus membangun

provinsi ini dengan semangat pembangunan berkelanjutan agar segala potensi sumber daya alamnya mampu mensejahterakan masyarakatnya dan mampu menjadi salah satu pilar dunia dalam meminimalisir perubahan iklim.

Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah digadang – gadang sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tutupan hutan paling luas di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, tentu Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam memenuhi target capaian pengurangan emisi nasional yang akan berdampak positif dalam pengurangan emisi di Internasional. Saat ini dengan luasan tutupan hutan yang lebih dari 7 juta hektar atau hampir separuh dari luas wilayah provinsi Kalimantan Tengah maka hutan di provinsi Kalimantan Tengah sangat berpotensi untuk mendukung penyerapan karbon.

Potensi wilayah hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki kawasan gambut yang cukup luas (sekitar 30% dari luas wilayah) yang menjadi tempat simpanan karbon (*carbon sink*). Simpanan karbon yang ada pada lahan gambut ini terus meningkat seiring penambahan ketebalan gambut yang diperkirakan mencapai 3 mm/tahun (Parish et al., 2008). Kondisi alami gambut harus senantiasa kita jaga agar tidak rusak dan berakibat fatal. Karena jika lahan gambut rusak akan mempercepat proses pelapukan (dekomposisi) dan kebakaran hutan dan lahan yang memicu terbentuknya gas rumah kaca (GRK) terutama gas CO₂ yang meningkat.

Menurut Joko (2011: 279) dalam Utami (2018:10) Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Berbagai potensi bencana alam terkait perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk kehilangan harta benda dan korban jiwa. Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, dapat dikurangi melalui mitigasi. Menurut Nursa'ban dalam Dewi (2016:130) Mitigasi diartikan sebagai upaya mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa dan harta benda baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural Hal yang sama, dalam Undang – Undang nomor 24 tahun 2007 dijelaskan bahwa pengertian mitigasi adalah penanggulangan bencana dijelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Carter (1992) Mitigasi (penjinakan) adalah upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk

mengurangi dampak dari bencana alam atau buatan manusia bagi bangsa atau masyarakat. Mitigasi diartikan sebagai setiap tindakan yang berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang terhadap harta dan jiwa manusia. Sehingga mitigasi dapat dikatakan sebagai sebuah mekanisme agar masyarakat dapat menghindari dampak dari bencana yang potensial terjadi. Tindakannya dapat berfokus pada penghindaran bencana, khususnya menghindari penempatan manusia dan harta benda di daerah berbahaya. untuk mengendalikan bahaya melalui berbagai pembangunan fasilitas khusus dan penerapan teknologi tertentu (Damaiyanti dalam Susanti, 2020:325). Termasuk usaha Mitigasi Bencana erat kaitannya dengan isu lingkungan salah satunya yaitu isu perubahan iklim. Menurut EPA (Environmental Protection Agency) perubahan iklim adalah perubahan dasar dalam curah hujan, suhu dan pola angin diantara sejumlah efek lain yang terjadi dalam jangka beberapa decade bahkan lebih. Perubahan Iklim menurut LAPAN (2002) yaitu perubahan rata – rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu.

Secara umum kerangka hukum atau kebijakan mengenai penanggulangan bencana di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada undang-undang tersebut telah diatur segala hal tentang penanggulangan bencana. Kebijakan lainnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, salah satunya adalah kegiatan mitigasi.

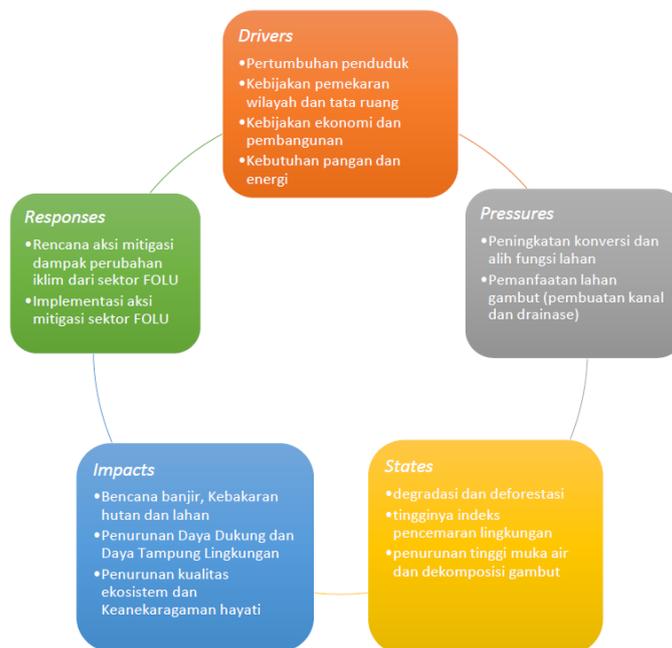
METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah berbasis studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud yaitu data – data yang dikumpulkan dalam tulisan ini bersumber dari dokumen – dokumen secara manual ataupun digital. Dokumen yang ditampilkan berasal baik referensi hasil riset terdahulu yang dipublikasi, kebijakan ataupun dalam bentuk naskah publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan maupun dokumentasi hasil – hasil kegiatan untuk mendukung tulisan yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai tindak lanjut Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Dunia secara umum dan Indonesia secara khusus, tahun 2022

ini telah dibuat Dokumen rencana kerja folu net sink 2030 sub nasional Kalimantan Tengah. Folu net sink 2030 FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, dalam target diproyeksikan angka net sink 140 juta ton CO₂e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂e tersebut. Dalam Program tersebut, berkaitan dengan peta wilayah yang ada di Kalimantan Tengah digambarkan melalui DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact, and Response*), yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan pada konsep rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan memahami faktor pemicu (*Driving force*), tekanan yang dihasilkan oleh faktor pemicu (*Pressure*), keadaan saat ini (*State*), dampak yang terjadi (*Impact*) dan respon yang diperlukan (*Response*). Menurut Setiawan & Adnan (2021) Analisis DPSIR dilakukan berdasarkan pada konsep rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan faktor pendukung dalam pengembangan sumber daya hutan dan lahan. Gambaran rantai hubungan potensi dan persoalan Folu di Kalimantan Tengah digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka DPSIR Folu di Kalimantan Tengah

Dengan adanya rencana kerja Indonesia's Folu net sink 2030 sub nasional Kalimantan Tengah harapannya adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya komitmen bersama antar para pihak berkepentingan pada sektor FOLU di provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung tercapainya Indonesia's FOLU Net Sink 2030;
2. Tersedianya rencana kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sector FOLU pada tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang dapat menjadi acuan para pihak berkepentingan;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan kegiatan bagi para pihak berkepentingan sektor FOLU di provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Rencana Operasional Aksi Mitigasi Sub Nasional Kalimantan Tengah tahun 2023 – 2030 terbagi dalam 12 kegiatan rencana operasional yaitu :

1. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral
2. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut
3. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Konsesi
4. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman
5. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pengayaan Hutan Alam (*Enhanced natural regeneration*)
6. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C
7. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi
8. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi
9. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut Gambut
10. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Restorasi Gambut
11. Rencana Operasional (RO) Perlindungan Area Konservasi Tinggi
12. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove

Masing-masing rencana aksi tersebut akan dilaksanakan pada lokasi yang sudah ditentukan sesuai arahan Indek Prioritas Lokasi (IPL) pada dokumen RENOPS FOLU Net Sink 2030. Pada penyusunan IPL tersebut, digunakan tiga informasi berbasis spasial yang meliputi; (1) Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT), (2) Peta Tipologi Kelembagaan, dan (3) Peta Indek Biogeofisik (IBGF). Area yang masuk kategori

prioritas tinggi ialah yang nilai IPL 7 sampai 9 dan yang masuk kategori sedang ialah yang nilai IPL 5 dan 6, dan yang rendah yang nilai IPL 1 sampai 4

Berbagai tantangan dalam pengelolaan lahan gambut memang menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah bagi semua pihak. Di Kalimantan Tengah sendiri salah satu ancaman yang sering menghantui adalah ketika musim kemarau potensi terjadi kebakaran lahan cukup tinggi. Faktor alam maupun faktor dari manusia menyebabkan kebakaran lahan di Kalimantan perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai Kalimantan Tengah sudah berkomitmen dalam pengurangan emisi gas Co₂ tetapi masih ada celah dalam bencana khususnya kebakaran lahan.

Mitigasi dalam kerusakan lahan gambut khususnya karena kebakaran lahan harus mampu diantisipasi oleh Pemerintah daerah dengan tahap-tahapan yang Komprehensif. Baik itu ketika pra bencana, ketika bencana terjadi ataupun pasca bencana terjadi. Hal ini urgent untuk diperhatikan mengingat jika kerusakan lahan akibat kebakaran berlangsung terus – menerus maka akan berdampak buruk bagi Kalimantan Tengah. Selain melibatkan stakeholders dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan gambut, hal yang juga harus dibangun kolaborasi adalah membangun komitmen untuk menjaga lahan gambut bersama pihak swasta (perusahaan) yang ada di Kalimantan Tengah. Hal ini mengingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang diminati dalam investasi khususnya dalam perkebunan.

Untuk mensukseskan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim melalui folu net sink 2030 sub nasional Kalimantan Tengah maka perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk mengukur efektivitas dan efisiensi berbagai program strategis yang telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi dalam rencana kerja folu net sink 2030 sub wilayah Kalimantan Tengah juga dilakukan berdasarkan target dan volume capaian yang telah ditetapkan dan jangka waktu untuk mencapai target dan volume capaian pada masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Pada Rencana Kerja tingkat sub nasional Kalimantan Tengah ini, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi rutin tahunan, dimana penilaian dilakukan setiap akhir tahun kegiatan/anggaran, yang dilakukan terhadap capaian kuantitas dan kualitas setiap kegiatan yang direncanakan.

- b. Monitoring dan Evaluasi tertentu, dimana penilaian dilakukan apabila terjadi perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak akibat adanya perubahan arah kebijakan maupun faktor lainnya (misalnya terjadi bencana alam)

KESIMPULAN

Berdasarkan dokumen – dokumen pendukung dalam mitigasi perubahan iklim di dunia, khususnya di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen dalam mendukung berbagai program strategis mitigasi perubahan iklim melalui keterlibatannya dalam program folu net sink 2030. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam rencana kerja folu net sink 2030 sub nasional Kalimantan Tengah. Keterlibatan berbagai SOPD (satuan operasional perangkat daerah) di Kalimantan Tengah tentu dengan berbagai keunikannya diharapkan mampu memaksimalkan implementasi berbagai program kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan akhir yaitu terpenuhinya target penurunan emisi di Dunia, di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Tengah. Harapannya berbagai program strategis ini terus berlanjut dan melibatkan masyarakat lokal di Kalimantan Tengah. Rencana kerja folu net sink 2023 – 2030 di Kalimantan telah disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan stakeholders terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dengan adanya rencana kerja tersebut, maka kedepan perlu adanya monitoring secara berjenjang dan berkala agar target – target kegiatan yang ingin dicapai dapat terukur ketercapaiannya. Dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat penting dalam mensukseskan program folu net sink 2023 – 2030 di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Indarti Komala & Yossa Istiadi. 2015. *Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya*. J.Manusia dan Lingkungan.23 (1)
- Carter, W. Nick. (1992). *Disaster management: a disaster manager's handbook*, Manila: Asian Development Bank

Edison, Muhammad Noor Fazri, Suprayitno, Ni Wayan Sukraini. 2020. *Environmentally Friendly And Economically Sustainable Local Peatland Cultivation Strategies*. Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik. 21(2), 171-178.

Nursyabani, Roni Ekha Putera, Kusdarini. 2020. *Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN). 08(2)

Parish F, Sirin A, Charman D, Joosten H, Minayeva T, Silvius M, Stringer L (eds) (2008) *Assessment on peatlands, biodiversity and climate change: main report*. Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International, Wageningen 179 pp.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pedoman Rencana Kerja Folu Net Sink Sub Nasional Kalimantan Tengah Tahun 2030

Setiawan, Y., & Adnan, F. J. J. T. L. (2021). *Model Driving Force, Pressure, State, Impact, Response (Dpsir) Dalam Menilai Kualitas Udara Kabupaten Kutai Barat*. 4(2), 31-36.

Susanti, Eva & Ikgang Putra Anggara. 2020. *Analisis Mitigasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. 10(2).

Utami, Selly Putri. 2018. *Kesiapsiagaan Warga Sekolah Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di SMP-SMA Plus Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya*. Repositori. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya

<https://gakkum.menlhk.go.id>

<https://kalteng.bps.go.id>

<https://www.forestdigest.com>

<https://www.infid.org>

<https://pustandpi.or.id/>